

Pengaruh Keuangan Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh

Rico Ricardo¹, Ayu Muchlisah², Feriansyah³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi, Universitas Pertamina

rico.ricardo@universitaspertamina.ac.id

Abstract

Poverty is one of the problems faced by Indonesia from the past until now. Various ways have been done to overcome the problem of poverty. One of the efforts that have been made by the Government of Indonesia is to issue a regional autonomy policy. The existence of this policy gives authority to local governments to regulate their own regions. This policy is given to all provinces in Indonesia, including Aceh. Aceh is the province with the highest poverty rate on the island of Sumatra, although it has a higher original regional income (PAD) than the province with the lowest poverty rate on the island of Sumatra. Aceh also has a greater natural resources revenue-sharing fund (DBH SDA) than the province of West Sumatra. In addition, Aceh also received special autonomy funds (DOK), which were only given to the provinces of Aceh, Papua, and West Papua. This study aims to analyze the effect of PAD, DBH SDA and DOK on the poverty rate of Aceh Province for the 2008-2020 period. This research uses panel data regression involving 23 districts/cities of Aceh Province. The results of the study show that only local real revenue has a significant and negative effect on poverty levels.

Keywords: Poverty, Local Real Revenue, Profit Sharing Fund of Natural Resource, Special Autonomy Fund, Panel Data.

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia sejak dulu hingga saat ini. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia adalah dengan mengeluarkan kebijakan otonomi daerah. Adanya kebijakan ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Kebijakan ini diberikan kepada seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Aceh. Aceh merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera meskipun memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar dari provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sumatera. Aceh juga memiliki dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) yang lebih besar dari pada provinsi Sumatera Barat. Selain itu Aceh juga mendapatkan dana otonomi khusus (DOK) yang mana dana ini hanya diberikan kepada Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, DBH SDA dan DOK terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Aceh periode 2008-2020. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan melibatkan 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pendapatan asli daerah yang memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Kata kunci: Kemiskinan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil SDA, Dana Otonomi Khusus, Data Panel.

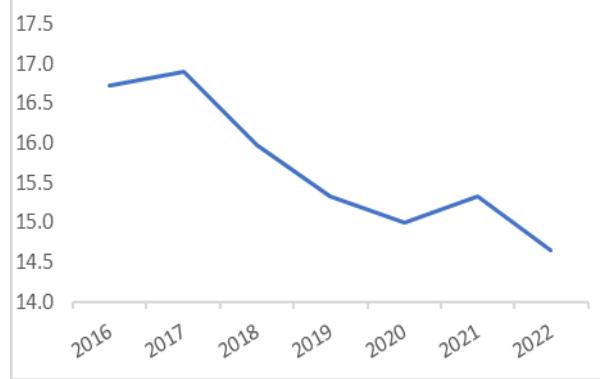
INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang hingga saat ini belum usai dan menjadi fenomena sosial yang selalu dihadapi oleh setiap negara [1]. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah guna menanggulangi kemiskinan di mana salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014. Dengan adanya otonomi daerah maka suatu wilayah memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri baik dalam urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat setempat [2]. Kebijakan ini diberikan kepada seluruh provinsi di Indonesia, tidak terkecuali Aceh [3].

Sebagai provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia, Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah [4]. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh masih sangat tinggi ditampilkannya pada Gambar 1. Sejak tahun 2016 hingga 2022, tingkat kemiskinan di Aceh masih berada di atas 10 persen.

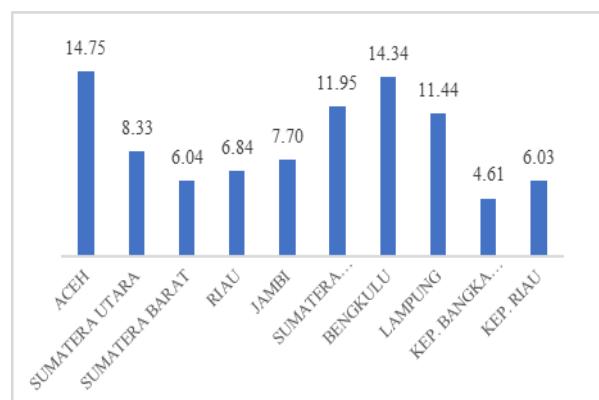


Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Aceh 2016-2022

Dalam konteks kabupaten dan kota, pada tahun 2022, Banda Aceh merupakan kota dengan tingkat kemiskinan terendah yakni 7,13 persen, yang diikuti oleh Kota Langsa dengan tingkat kemiskinan mencapai 10,62 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Gayo Lues

merupakan yang tertinggi di Aceh dimana masing-masing mencapai 19,18 persen dan 18,87 persen.

Meskipun kemiskinan di Aceh memiliki tren yang menurun, namun jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera, Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Pada tahun 2022, sebanyak 14,75 persen penduduk Aceh masuk dalam kategori miskin. Adapun di tahun yang sama, tingkat kemiskinan di Kepulauan Bangka Belitung memiliki persentase yang jauh lebih rendah yaitu sebesar 4,61 persen. Rendahnya persentase kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengindikasikan bahwa pemerintah setempat cukup mampu memanfaatkan kebijakan otonomi daerah dalam upaya menurunkan kemiskinan di daerahnya [5]. Pemerintah setempat juga cenderung berhasil dalam memulihkan perekonomian setempat pasca pandemic covid-19 yang terjadi sejak awal 2020. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka pemerintah kota dan pemerintah kabupaten mampu memberikan peran nyata dalam mengelola daerahnya dari berbagai bidang termasuk program pengentasan kemiskinan [6]. Selanjutnya Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera 2022 ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera 2022

Dalam upaya menerapkan program-program pengentasan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Aceh memerlukan dana yang cukup memadai. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa sistem keuangan dalam otonomi daerah didapat dari penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dari pemerintah pusat [7]. Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang diperoleh dari sumber ekonomi daerah seperti pajak daerah, kekayaan daerah, retribusi daerah dan penerimaan yang sah lainnya [8]. Setiap daerah memiliki PAD yang berbeda-beda, tergantung dari kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatannya dan juga dalam mengelola kekayaan sumber daya alamnya [9]. Sumber pendapatan ini dipergunakan untuk peningkatan pelayanan dan pembangunan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat [10]. Berdasarkan Tabel 1, PAD Provinsi Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian, hal ini belum mampu menggeser Aceh sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera. Jika dilihat

dari besaran PAD, seharusnya Aceh mampu memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dari pada Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau yang ketiganya memiliki PAD lebih kecil dibandingkan Aceh. Selanjutnya pendapatan asli daerah disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Bangka Belitung	Kep. Riau	Sumatera Barat	Aceh
2016	574,26	1.039,40	1.964,15	2.060,18
2017	709,83	1.094,78	2.134,01	2.276,30
2018	850,44	1.220,59	2.275,09	2.359,39
2019	826,70	1.298,91	2.328,43	2.698,91
2020	683,43	1.195,63	2.255,07	2.570,78
2021	895,76	1.375,77	2.551,90	2.505,89
2022	814,52	1.348,49	2.613,76	2.568,19

Sumber keuangan pemerintah daerah lainnya yaitu berasal dari dana bagi hasil [11]. Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah [12]. Dana ini terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi sumber daya alam (DBH SDA). Daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam maka akan memiliki DBH SDA yang besar dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki sumber daya alam [13]. Hal ini dikarenakan DBH SDA dibagikan berdasarkan prinsip *by origin* dimana DBH SDA dibagikan kepada daerah-daerah dimana sumber daya alam berasal [14].

Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah diantaranya sumber daya pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan pertambangan. Pada sektor minyak dan gas, Provinsi Aceh menerima persentase yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lain yaitu masing-masing sebesar 55 persen dan 40 persen. Jika dilihat pada Tabel 2, DBH SDA di Provinsi Aceh cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, Provinsi Aceh menerima sebesar 20,71 miliar Rupiah yang kemudian meningkat menjadi 414,31 miliar Rupiah pada tahun 2020 meskipun pada akhirnya turun kembali menjadi 19,45 miliar Rupiah pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan Sumatera Barat yang merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sumatera, Provinsi Aceh masih mendapatkan DBH SDA yang lebih besar. Selanjutnya dana bagi SDA disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Dana Bagi Hasil SDA (dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Bangka Belitung	Kep. Riau	Sumatera Barat	Aceh
2016	92,60	282,04	4,35	20,71
2017	81,79	328,67	13,34	33,45
2018	162,03	379,76	15,53	32,29
2019	161,04	634,00	26,42	98,33
2020	84,35	262,82	18,33	414,31
2021	n.a.	188,76	n.a.	19,45
2022	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Selain dana bagi hasil SDA dan pendapatan asli daerah sebagai sumber keuangan daerah, Aceh juga mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat

yaitu dengan diberikan dana otonomi khusus (DOK). Dana ini pertama kali diberikan kepada Provinsi Aceh pada tahun 2008. Menurut data BPS Provinsi Aceh, total DOK yang diterima oleh Provinsi Aceh hingga tahun 2022 telah mencapai 95,92 triliun rupiah. Ditinjau dari total penerimaan dana otonomi khusus yang sangat besar, maka besaran dana yang diperoleh ini seharusnya mampu membuat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh menjadi lebih baik dibandingkan dengan daerah lain yang tidak menerima otonomi khusus tetapi memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah, seperti Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat.

Jika dilihat dari besaran dana yang diperoleh dari PAD, DBH SDA dan DOK, sangat memungkinkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh menurun hingga mencapai angka satu digit. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menganalisis dampak variabel pendapatan daerah tersebut terhadap kemiskinan [15]. Namun demikian hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan kontradiksi terkait dampak ketiga variabel pendapatan daerah terhadap tingkat kemiskinan [16]. Perlu dilakukan kajian lanjutan untuk dapat mengonfirmasi bagaimana dampak variabel pendapatan daerah terhadap tingkat kemiskinan, khususnya di Provinsi Aceh.

Beberapa studi menemukan bahwa PAD dapat menurunkan tingkat kemiskinan [17]. Peningkatan PAD dapat menurunkan tingkat kemiskinan melalui belanja modal dan belanja barang dan jasa [18]. Sementara dalam konteks dana bagi hasil (DBH), ditemukan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan [19]. Meskipun demikian, dalam penelitian lainnya ditemukan bahwa DBH memberikan pengaruh yang negatif terhadap tingkat kemiskinan [20].

Studi tentang pengaruh DOK juga telah dilakukan sebelumnya dimana terdapat kontradiksi dalam hasil studinya. Dalam beberapa studi ditemukan bahwa DOK tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Namun demikian terdapat sebuah studi yang menemukan hasil yang berbeda dimana DOK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Aceh. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga penerimaan daerah yaitu PAD, DBH SDA dan DOK terhadap tingkat kemiskinan di Aceh.

2. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel. Data panel merupakan gabungan data *cross section* dan data *time series*. Penelitian ini menggunakan rentang waktu tahun 2008 sampai 2020 serta melibatkan data *cross section* 5 kota dan 18 kabupaten di Provinsi Aceh. Data-data ini diperoleh dari berbagai sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (Bappeda) Aceh dan CEIC.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi data panel untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD, DBH SDA, DOK dan PDRB. Sementara itu, variabel dependennya adalah tingkat kemiskinan. Terdapat beberapa tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pengolahan data, penentuan model terbaik, uji asumsi klasik, dan uji statistik. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut (1).

$$pov_{it} = \beta_0 + \beta_1 pad_{it} + \beta_2 dbh_{it} + \beta_3 dok_{it} + \beta_4 pdrb_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Dimana pov adalah Tingkat kemiskinan (%); pad adalah Logaritma natural pendapatan asli daerah; dbh adalah Logaritma natural dana bagi hasil SDA; dok adalah Logaritma natural dana otonomi khusus; $pdrb$ adalah Logaritma natural pendapatan domestik regional bruto riil; $\beta_0, \beta_1..$ adalah Koefisien regresi; e adalah Error; i adalah *Cross section* 23 kab/kota di provinsi Aceh; t adalah *Time series* tahun 2008-2020.

3. Hasil dan Pembahasan

Terdapat beberapa tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penentuan model terbaik dengan melibatkan uji kesesuaian model, uji asumsi klasik dengan melibatkan uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas dan interpretasi hasil dengan menggunakan uji statistik. Dalam pemilihan model terbaik, diperlukan tahap pengujian yang terdiri dari Uji Hausman, Uji Chow dan Uji Langrange Multiplier. Namun dalam penelitian ini hanya melibatkan dua uji yaitu Uji Hausman dan Uji Chow. Hasil uji menunjukkan bahwa model terbaik dalam penelitian ini adalah *fixed effect model* (FEM). Selanjutnya hasil uji multikolinieritas disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	pad	dbh sda	dok	pdrb
pad	1,000			
dbh sda	-0,186	1,000		
dok	0,313	-0,037	1,000	
pdrb	0,579	0,223	0,272	1,000

Tahap selanjutnya yaitu melakukan pengujian asumsi klasik. Dalam regresi data panel pengujian asumsi klasik dapat meliputi pengujian multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan dalam model ini tidak terindikasi adanya multikolinearitas hal ini dikarenakan nilai korelasi setiap variabel tidak lebih dari 0,8 atau 80 persen. Sedangkan untuk uji heteroskedastisitas dan autokorelasi menunjukkan hasil nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansinya yang artinya terdapat masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam model ini. Oleh karena itu diperlukan perbaikan model menggunakan Driscoll-Kraay *standard errors*. Selanjutnya hasil perbaikan asumsi klasik estimasi FEM disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Perbaikan Asumsi Klasik Estimasi FEM

Variabel	Koefisien	Prob
Pad	-0,0584283	0,000**
dbh sda	0,0048641	0,648
Dok	-0,032564	0,596
Pdrb	-0,2604442	0,003**
konstanta	5.6951099	0,000**
Prob>F		0,0000
R		0,9592

Setelah melakukan perbaikan model, maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji statistik dengan menggunakan uji signifikansi serentak (uji-F), uji parsial (uji-t), dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil estimasi menunjukkan bahwa uji signifikan global memiliki nilai probabilitas (Prob>F) lebih kecil dari pada taraf nyata lima persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen dalam model ini mempengaruhi variabel dependen. Hasil ini juga dibuktikan dari hasil uji individu yang mana seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari taraf nyata lima persen. Kemudian nilai R^2 menunjukkan angka sebesar 0,9592, yang artinya semua variabel independen dalam model ini dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 95,92 persen, sedangkan 4,08 persen lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel diluar model penelitian.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil estimasi menunjukkan bahwa PAD secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar 0,0584. Hal ini berarti, apabila dana PAD meningkat satu persen maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,0584 poin persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Sebaliknya, apabila dana PAD menurun satu persen maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,0584 poin persen.

Pendapatan asli daerah merupakan indikator dalam mengukur kemiskinan suatu daerah, dimana semakin tinggi penerimaan PAD akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akan menurunkan angka kemiskinan. Keberadaan PAD dapat berdampak positif terhadap belanja daerah yang artinya semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan PAD maka daerah semakin meningkatkan belanja daerah. Peningkatan PAD pada akhirnya akan meningkatkan belanja modal dan belanja barang dan jasa dan kemudian memiliki efek terhadap penurunan tingkat kemiskinan Aceh.

Sumber keuangan yang berasal dari PAD dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan daerahnya. Terdapat berbagai cara untuk meningkatkan pengoptimalan PAD diantaranya pemerintah daerah mengidentifikasi potensi dan sumber-sumber daya yang dimiliki daerah. Daerah dengan pertumbuhan PAD yang positif cenderung memiliki pertumbuhan

ekonomi yang lebih baik, dimana salah satu indikatornya adalah penurunan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, apabila suatu daerah tidak dapat menggali potensi penerimaan daerahnya, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keahlian, maka akan berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan suatu daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang menunjang kegiatan ekonomi suatu daerah. Selanjutnya, penerimaan PAD dapat menggerakkan roda perekonomian karena dana tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk belanja daerah seperti investasi, pembangunan infrastruktur sampai pada alokasi subsidi yang akan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta menurunkan tingkat kemiskinan.

Pengaruh Dana Bagi Hasil SDA terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dana bagi hasil SDA tidak secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil ini sejalan dengan studi yang telah dilakukan di Kota Manado, dimana dana bagi hasil (pajak/SDA) tidak secara signifikan mengatasi permasalahan kemiskinan di Kota Manado. Provinsi Aceh memiliki luas wilayah sebesar 57.365,57 km² yang membentang dalam 6.770,81 km² dengan memiliki 119 pulau, 73 sungai, 35 gunung dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah yang tersebar di 6.450 kampung. Melimpahnya SDA di Aceh akan berimplikasi pada tingginya penerimaan DBH SDA dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan pembagian hasil SDA dilakukan berdasarkan prinsip *by regional* yang artinya DBH SDA dibagikan kepada daerah-daerah dimana SDA tersebut berasal. Daerah yang kaya SDA memiliki DBH SDA lebih besar dari pada daerah lain yang tidak memiliki SDA. Dana ini merupakan salah satu dana perimbangan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah terutama dalam memberikan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Namun demikian, besarnya DBH SDA tersebut tidak serta merta mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan di Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa Aceh belum mampu mengatasi fenomena kutukan sumber daya alam (*natural resource curse*). Kutukan SDA adalah suatu paradoks yang dikenal dalam ekonomi yang menyatakan bahwa ketika SDA yang dimiliki suatu daerah tinggi justru memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. *Natural resource curse* (NRC) tidak hanya terjadi pada tingkat negara tetapi juga terjadi pada tingkat daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Melimpahnya sumber daya alam tidak selalu membawa dampak positif dan justru mengarah pada bencana ekonomi. Daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menjadikan masyarakat lebih sejahtera, tetapi sebaiknya membuat

masyarakat lebih sengsara. Kesalahan perencanaan dari besarnya pendapatan yang di dapat dari industrialisasi SDA adalah volatitas pendapatan, konflik sosial dan konflik lingkungan. Pernyataan ini juga di dukung oleh fakta bahwa Provinsi Aceh pernah mengalami konflik senjata yang disebabkan karena ketidakpuasan atas distribusi SDA Provinsi Aceh yang pada akhirnya berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan tingginya tingkat kemiskinan.

Fenomena NRC lebih rentan terjadi pada provinsi yang memiliki pertambangan. Tingginya tingkat kemiskinan seringkali terjadi di daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti daerah pertambangan. Hal ini dikarenakan perubahan dari sektor agraris ke sektor pertambangan yang membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian karena tergesur oleh pertambangan sehingga menyebabkan tingkat kemiskinan tinggi. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang kegiatan ekonominya di dominasi oleh kegiatan di sektor pertambangan dan juga memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Pernyataan ini terbukti terjadi di Provinsi Aceh tepatnya pada Kabupaten Aceh Barat yang terkenal sebagai penghasil tambang batu bara. Kabupaten ini memiliki cadangan batu bara yang tinggi namun tingkat kemiskinan di kabupaten ini sangat tinggi jika dibandingkan kabupaten/kota yang bukan termasuk daerah penghasil sumber daya alam.

Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh. Seperti halnya dengan DBH SDA, hasil estimasi pada model *fixed effect* menunjukkan bahwa DOK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh pada tahun 2008-2020. Hasil ini mengonfirmasi studi yang menyatakan bahwa DOK tidak secara signifikan memengaruhi kemiskinan. Dana otonomi khusus adalah penerimaan pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat yang diperuntukkan untuk menjaga dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Dana otonomi khusus menjadi penyokong anggaran Provinsi Aceh dimana pada tahun 2019 proporsi dana otonomi khusus dalam APBD Aceh mencapai 48,88 persen yang artinya 48,88 persen anggaran belanja Aceh disumbang oleh dana ini.

Dengan adanya dana ini, seharusnya Provinsi Aceh dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut mengingat dana ini digunakan untuk membiayai program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama program pengentasan kemiskinan. Dana otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan dalam rangka mendorong meningkatkan pelayanan publik, akselerasi pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah Aceh.

Dana otonomi khusus diberikan kepada Provinsi Aceh dalam waktu 20 tahun yaitu terhitung dari tahun 2008 sampai dengan 2028. Tabel 5 menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Aceh telah mengalokasikan dana otonomi khusus sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan. Namun demikian, jika dilihat secara proporsi, maka akan dapat disimpulkan bahwa persentase DOK yang dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan hanya sebesar 3,63 persen antara tahun 2014-2018. Berbeda jauh dengan alokasi yang digunakan oleh pemerintah setempat untuk sektor infrastruktur yang rata-rata dialokasikan sebesar 45,34 persen pada rentang waktu yang sama. Hal ini dapat menjelaskan hasil studi ini yang menunjukkan bahwa DOK tidak secara signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan di Aceh. Selanjutnya alokasi dana otonomi khusus tahun 2016-2018 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun 2016-2018 (dalam Miliar Rupiah)

Bidang	2016	2017	2018
Infrastruktur	3.710,64	2.867,35	3.643,75
Pemberdayaan Ekonomi	961,39	941,53	767,25
Pengentasan Kemiskinan	168,81	412,42	462,34
Pendidikan	1.677,46	2.014,28	1.624,27
Sosial	131,02	218,23	147,9
Kesehatan	956,62	1.280,06	1.178,77
Keistimewaan Aceh	181,69	237,78	205,51
Total	7.707,21	7.971,79	8.029,79

4. Kesimpulan

Dalam upayanya untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan, setiap daerah dapat memanfaatkan beberapa dana, baik yang berasal dari potensi daerah dan dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Dalam kasus Aceh ini ditemukan bahwa PAD memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini dikarenakan penerimaan dari PAD digunakan untuk belanja pemerintah daerah seperti investasi, pembangunan dan alokasi subsidi sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan tingkat kemiskinan. Namun demikian, berbeda halnya dengan DBH SDA dan DOK yang tidak secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Aceh belum mampu mengatasi fenomena *natural resource curse* dimana ini terlihat dari fakta bahwa provinsi Aceh pernah mengalami konflik senjata yang disebabkan karena ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Provinsi Aceh yang pada akhirnya berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan mengakibatkan pada tingginya tingkat kemiskinan. Selain itu, DOK juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Aceh. Minimnya persentase alokasi DOK untuk program-

program pengentasan kemiskinan dianggap sebagai faktor yang menyebabkan variabel ini tidak memiliki dampak terhadap permasalahan kemiskinan di Aceh. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan oleh pemerintah terkait pendapatan asli daerah, dana bagi hasil SDA dan dana otonomi khusus guna menurunkan tingkat kemiskinan Provinsi Aceh. Pertama, Pemerintah daerah sebaiknya lebih meningkatkan dan memperhatikan pada sektor sektor yang dapat meningkatkan PAD. Kedua, pemerintah daerah lebih memerhatikan tingkat kemiskinan di daerah penghasil sumber daya alam seperti daerah pertambangan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat setempat khususnya masyarakat yang akan terkena dampak. Ketiga, dalam alokasi DOK sebaiknya pemerintah daerah lebih meningkatkan anggaran pada bidang pengentasan kemiskinan dan pengawasan terhadap alokasi DOK juga ditingkatkan. Selain itu untuk pemerintah pusat akan lebih baik pemberian DOK terus berlanjut hingga kemiskinan di Provinsi Aceh menepati angka satu digit.

Daftar Rujukan

- [1] Kurniawan, M. (2017). Analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin (Studi kasus di Kecamatan Sungai Lilin). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(1), 16–20. DOI: <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v8i1.231>
- [2] Yacoub, Y. (2012). Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 8(3), 176–185. DOI: <http://222.124.219.216/xmlui/handle/123456789/63>
- [3] Budiratna, H., & Qibthiyyah, R. M. (2020). Evaluasi atas transfer dana otonomi khusus di Aceh, Papua dan Papua Barat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(5) 402-414. DOI: <https://doi.org/10.59141/jiss.v1i05.103>
- [4] Ismail, A., & Hakim, A. (2014). Peran dana perimbangan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 16(9), 2168. DOI: <https://doi.org/10.20885/jabis.vol16.iss9.art8>
- [5] Fargana, T. M., & Ikhsan, I. (2017). Pengaruh perjanjian damai MOU-Helsinki terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 2(4), 646–653. DOI: <https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/5739/2424>
- [6] Le, Thai-Ha., & Tran-Nam, B. (2018). Trade Liberalization, Financial Modernization, and Economic Development: An Empirical Study of Selected Asia-Pasific Countries. *Research in Economics*, 72 (2), 434–355. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rie.2017.03.001>
- [7] Rahmawati, M., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–76. DOI: <https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.445>
- [8] Rahma, H., Fauzi, A., Juanda, B., & Widjajanto, B. (2021). Fenomena Natural Resource Curse dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*
- [9] Sachs, J., & Warner, A. (1995). Natural Resource Abundance and Economic Growth. *NBER Working Paper Series*. DOI: <https://doi.org/10.3386/w5398>
- [10] Zaini, A. (2010). Kemiskinan di Daerah Kaya Sumber Daya Alam: Sebuah Paradoks Pembangunan. *Jurnal Borneo Administrator*, 6(1), 1–19. DOI: <https://doi.org/10.24258/jba.v6i1.56>
- [11] Machfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14. DOI: <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423>
- [12] Permatasari, N., Priyarseno, D. S., & Rifin, A. (2017). Perencanaan Pembangunan Ekonomi Wilayah Berbasis Pertanian dalam Rangka Pengurangan Kemiskinan di Kalimantan Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 4(1), 27. DOI: <https://doi.org/10.29244/jai.2016.4.1.27-42>
- [13] Zhou, L., & Wang, H. (2021). An Approach to Study the Poverty Reduction Effect of Digital Inclusive Finance from a Multidimensional Perspective Based on Clustering Algorithms. *Scientific Programming*, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1155/2021/4645596>
- [14] Putri, R. A., Zamzami, Z., & Rahmadi, S. (2021). Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 107–122. DOI: <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i2.12858>
- [15] Wang, X., & Fu, Y. (2022). Digital Financial Inclusion and Vulnerability to Poverty: Evidence From Chinese Rural Households. *China Agricultural Economic Review*, 14(1), 64–83. DOI: <https://doi.org/10.1108/CAER-08-2020-0189>
- [16] Panggabean, H. L., Hariiani, D., & B, A. Y. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019. *Owner*, 6(2), 2200–2208. DOI: <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.836>
- [17] Baiwei, X., Hanif, I., Wasim, S., & Rehman, S. (2023). Sustainable Finance, Natural Resource Abundance, and Energy Poverty Trap: The Environmental Challenges In The Era Of COVID-19. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(10), 26535–26544. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11356-022-23986-7>
- [18] Faqiyah, U., & Salim, W. (2020). Seeking prosperity through village proliferation: An evidence of the implementation of village funds (Dana Desa) in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, 31(2), 97–121. DOI: <https://doi.org/10.5614/jpkw.2020.31.2.1>
- [19] Barton, J. R., Gutierrez-Antinopai, F., & Ulloa, M. E. (2021). Adaptive Capacity as Local Sustainable Development: Contextualizing and Comparing Risks and Resilience In Two Chilean Regions. *Sustainability (Switzerland)*, 13(9). DOI: <https://doi.org/10.3390/su13094660>
- [20] Wiwoho, J., Saputro, N., Pamungkas, P., Trinugroho, I., Ariefianto, M. D., & Goestjahantie, F. S. (2021). Rural Bank and Regional Economic Development: Evidence From Indonesia. *International Journal of Business and Society*, 22(2), 818–827. DOI: <https://doi.org/10.33736/ijbs.3761.2021>